

2. Dalam konteks peran perempuan di DPW PKB Jawa Timur menurut Fiqh Syiyasah, perempuan di perbolehkan melakukan peran-peran tersebut dengan konsekwensi bahwa ia dapat di pandang mampu dan memiliki kapasitas untuk menduduki peran sosial dan politik tersebut. Dengan kata lain bahwa kedudukan perempuan dalam proses sistem Negara bangsa telah terbuka lebar, terutama perannya dalam masyarakat majemuk ini, dengan tetap mengingat bahwa kualitas, kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas bagaimanapun, harus menjadi ukuran sekaligus tanpa melupakan fungsi kodrati perempuan sebagai sebuah keniscayaan.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Peran Perempuan DPW PKB Jawa Timur Perspektif Fiqh Siyasyah”, penulis menyadari kalau penulisan skripsi ini masih jauh dengan kata sempurna, akan tetapi penulis berusaha menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini sesempurna mungkin. Semoga study ini dapat menjadi bagian kecil dari rujukkan untuk diri kita. Dan mudah-mudahan selain memberi guna juga memberi manfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya bagi perkembangan perpolitikan seorang perempuan di Indonesia. Disisi lain semoga tulisan ini bisa bermanfaat guna mengembangkan khasanah keilmuan yang ada di dunia perpolitikan dan semoga para kader perempuan DPW PKB benar-benar bisa mengemban amanah rakyat dan benar-benar bisa menampung

